



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) Penyusunan pagu anggaran ADD Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu anggaran ADD diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan menjadi Alokasi Dana Desa Daerah.
- (3) Besaran pagu ADD Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 67.099.125.100,00 (Enam puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 4

Tata Cara Perhitungan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pagu ADD Daerah dibagi kepada 176 (seratus tujuh puluh enam) Desa di Kabupaten Sigi.

Rumus :

Alokasi dasar = Pagu Daerah x 80% / Jumlah Desa

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = [(0,35 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,20 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
- Z1 Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa daerah.
- Z2 Rasio jumlah rumah tangga miskin setiap Desa terhadap total rumah tangga miskin Desa Daerah.
- Z3 Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah daerah.
- Z4 Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG kabupaten yang dimiliki Desa.
- ADDkab = Alokasi Dana Desa kabupaten
- ADkab = Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I yaitu :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD per desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) ADD ditetapkan dalam APBDDesa digunakan untuk mendanai belanja desa untuk:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Belanja Desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan umum berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa.
- (4) Belanja Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa, antara lain :
 - a. kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. kegiatan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - c. kegiatan pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - d. kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Desa;
 - e. kegiatan pengelolaan dan pembinaan keagamaan;
 - f. kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemuda;
 - g. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga adat; dan
 - h. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2017

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2017

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal, 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Penata Tkt. I
Nip.19721205 2002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	SIGI BIROMARU	SIDONDO II	304,996,023	39,419,026	344,415,000
2	SIGI BIROMARU	SIDONDO I	304,996,023	120,679,877	425,675,900
3	SIGI BIROMARU	BORA	304,996,023	89,716,933	394,713,000
4	SIGI BIROMARU	WATUNONJU	304,996,023	52,497,927	357,493,900
5	SIGI BIROMARU	OLOBUJU	304,996,023	68,416,489	373,412,500
6	SIGI BIROMARU	SOULOWE	304,996,023	61,871,260	366,867,300
7	SIGI BIROMARU	SIDERA	304,996,023	81,480,103	386,476,100
8	SIGI BIROMARU	JONO OGE	304,996,023	116,723,169	421,719,200
9	SIGI BIROMARU	KALUKUBULA	304,996,023	340,909,842	645,905,900
10	SIGI BIROMARU	LOLU	304,996,023	145,239,060	450,235,100
11	SIGI BIROMARU	POMBEWE	304,996,023	125,861,954	430,858,000
12	SIGI BIROMARU	LORU	304,996,023	139,563,375	444,559,400
13	SIGI BIROMARU	MPANAU	304,996,023	135,209,289	440,205,300
14	SIGI BIROMARU	NGATABARU	304,996,023	84,005,583	389,001,600
15	SIGI BIROMARU	MARANATHA	304,996,023	101,021,172	406,017,200
16	SIGI BIROMARU	SIDONDO III	304,996,023	80,417,464	385,413,500
17	SIGI BIROMARU	SIDONDO IV	304,996,023	44,956,785	349,952,800
18	PALOLO	BOBO	304,996,023	65,295,018	370,291,000
19	PALOLO	BUNGA	304,996,023	79,870,659	384,866,700
20	PALOLO	KAPIROWE	304,996,023	64,704,614	369,700,600
21	PALOLO	MAKMUR	304,996,023	80,842,967	385,839,000
22	PALOLO	BERDIKARI	304,996,023	59,201,301	364,197,300
23	PALOLO	PATIMBE	304,996,023	61,225,216	366,221,200
24	PALOLO	AMPERA	304,996,023	58,257,885	363,253,900
25	PALOLO	REJEKI	304,996,023	76,934,059	381,930,100
26	PALOLO	SINTUWU	304,996,023	74,398,742	379,394,800
27	PALOLO	SIGIMPU	304,996,023	61,847,320	366,843,300
28	PALOLO	BAKUBAKULU	304,996,023	106,187,933	411,184,000
29	PALOLO	BAHAGIA	304,996,023	56,459,559	361,455,600
30	PALOLO	RAHMAT	304,996,023	81,187,638	386,183,700
31	PALOLO	TANAH HARAPAN	304,996,023	42,856,777	347,852,800
32	PALOLO	RANTELEDA	304,996,023	50,464,128	355,460,200
33	PALOLO	TONGOA	304,996,023	163,478,010	468,474,000
34	PALOLO	LEMBANTONGOA	304,996,023	127,742,569	432,738,600
35	PALOLO	UWE NUNI	304,996,023	152,570,218	457,566,200
36	PALOLO	SEJAHTERA	304,996,023	79,632,861	384,628,900
37	PALOLO	UE RANI	304,996,023	48,820,925	353,816,900
38	PALOLO	KARUNIA	304,996,023	50,316,957	355,313,000
39	PALOLO	SARUMANA	304,996,023	36,318,693	341,314,700
40	NOKILALAKI	KAMARORA A	304,996,023	89,178,124	394,174,100
41	NOKILALAKI	KAMARORA B	304,996,023	79,996,024	384,992,000
42	NOKILALAKI	KADIDIA	304,996,023	48,833,505	353,829,500
43	NOKILALAKI	SOPU	304,996,023	38,443,508	343,439,500
44	NOKILALAKI	BULILI	304,996,023	63,643,940	368,640,000
45	LINDU	PUROO	304,996,023	71,001,285	375,997,300
46	LINDU	LANGKO	304,996,023	55,415,078	360,411,100
47	LINDU	TOMADO	304,996,023	102,022,466	407,018,500

1	2	3	4	5	6 (4+5)
48	LINDU	ANCA	304,996,023	52,081,819	357,077,800
49	LINDU	OLU	304,996,023	78,458,615	383,454,600
50	KULAWI	SIWONGI	304,996,023	84,185,982	389,182,000
51	KULAWI	BANGGAIBA	304,996,023	50,192,041	355,188,100
52	KULAWI	TANGKULOWI	304,996,023	50,544,076	355,540,100
53	KULAWI	BOLADANGKO	304,996,023	57,572,377	362,568,400
54	KULAWI	LONCA	304,996,023	60,461,161	365,457,200
55	KULAWI	RANTEWULU	304,996,023	66,862,227	371,858,300
56	KULAWI	TOWULU	304,996,023	104,157,189	409,153,200
57	KULAWI	WINATU	304,996,023	80,933,492	385,929,500
58	KULAWI	SUNGKU	304,996,023	74,748,764	379,744,800
59	KULAWI	BOLAPAPU	304,996,023	106,403,608	411,399,600
60	KULAWI	MATAUE	304,996,023	41,190,482	346,186,500
61	KULAWI	TORO	304,996,023	120,040,591	425,036,600
62	KULAWI	SALUA	304,996,023	55,473,401	360,469,400
63	KULAWI	NAMO	304,996,023	94,093,185	399,089,200
64	KULAWI	MARENA	304,996,023	46,593,343	351,589,400
65	KULAWI	POLEROA MAKUHI	304,996,023	51,928,566	356,924,600
66	KULAWI SELATAN	LEMPELERO	304,996,023	86,696,741	391,692,800
67	KULAWI SELATAN	GIMPU	304,996,023	59,845,245	364,841,300
68	KULAWI SELATAN	TOMUA	304,996,023	71,286,039	376,282,100
69	KULAWI SELATAN	TOMPI BUGIS	304,996,023	36,689,536	341,685,600
70	KULAWI SELATAN	LAWUA	304,996,023	85,995,632	390,991,700
71	KULAWI SELATAN	WATUKILO	304,996,023	59,402,326	364,398,300
72	KULAWI SELATAN	SALUTOME	304,996,023	43,008,056	348,004,100
73	KULAWI SELATAN	O'O PARESE	304,996,023	55,098,006	360,094,000
74	KULAWI SELATAN	PILIMAKUJAWA	304,996,023	50,836,529	355,832,600
75	KULAWI SELATAN	MOA	304,996,023	75,687,994	380,684,000
76	KULAWI SELATAN	WANGKA	304,996,023	51,132,111	356,128,100
77	KULAWI SELATAN	PALAMAKI	304,996,023	43,949,697	348,945,700
78	PIPIKORO	KOJA	304,996,023	63,302,662	368,298,700
79	PIPIKORO	KALAMANTA	304,996,023	58,740,844	363,736,900
80	PIPIKORO	MAMU	304,996,023	48,373,815	353,369,800
81	PIPIKORO	PEANA	304,996,023	71,448,183	376,444,200
82	PIPIKORO	KANTEWU	304,996,023	59,489,078	364,485,100
83	PIPIKORO	ONU	304,996,023	68,832,960	373,829,000
84	PIPIKORO	MAPAHI	304,996,023	54,709,020	359,705,000
85	PIPIKORO	BANASU	304,996,023	84,773,082	389,769,100
86	PIPIKORO	LONEBASA	304,996,023	95,351,211	400,347,200
87	PIPIKORO	LAWE	304,996,023	62,579,823	367,575,800
88	PIPIKORO	MORUI	304,996,023	53,550,188	358,546,200
89	PIPIKORO	KANTEWU II	304,996,023	50,957,389	355,953,400
90	PIPIKORO	PORELEA	304,996,023	55,675,851	360,671,900
91	PIPIKORO	TUWO TANIJAYA	304,996,023	58,649,001	363,645,000
92	PIPIKORO	PELEMPEA	304,996,023	58,806,429	363,802,500
93	PIPIKORO	MORUI II	304,996,023	56,677,686	361,673,700
94	PIPIKORO	POLUROA	304,996,023	36,680,665	341,676,700
95	PIPIKORO	MASEWO	304,996,023	82,138,442	387,134,500
96	PIPIKORO	PORELEA II	304,996,023	54,274,915	359,270,900
97	GUMBASA	TUWA	304,996,023	78,613,338	383,609,400
98	GUMBASA	OMU	304,996,023	80,799,482	385,795,500
99	GUMBASA	SIMORO	304,996,023	44,254,670	349,250,700
100	GUMBASA	PAKULI	304,996,023	97,452,207	402,448,200
101	GUMBASA	PANDERE	304,996,023	112,378,844	417,374,900
102	GUMBASA	KALAWARA	304,996,023	70,727,872	375,723,900
103	GUMBASA	PAKULI UTARA	304,996,023	60,161,908	365,157,900
104	DOLO SELATAN	BANGGA	304,996,023	124,574,248	429,570,300

1	2	3	4	5	6 (4+5)
105	DOLO SELATAN	WALATANA	304,996,023	104,372,069	409,368,100
106	DOLO SELATAN	BULUBETE	304,996,023	92,846,411	397,842,400
107	DOLO SELATAN	BALUASE	304,996,023	145,885,674	450,881,700
108	DOLO SELATAN	ROGO	304,996,023	104,296,216	409,292,200
109	DOLO SELATAN	PULU	304,996,023	65,070,551	370,066,600
110	DOLO SELATAN	BALONGGA	304,996,023	56,207,597	361,203,600
111	DOLO SELATAN	SAMBO	304,996,023	56,894,089	361,890,100
112	DOLO SELATAN	WISOLO	304,996,023	75,206,884	380,202,900
113	DOLO SELATAN	JONO	304,996,023	50,405,425	355,401,400
114	DOLO SELATAN	POI	304,996,023	47,203,288	352,199,300
115	DOLO SELATAN	RAMBA	304,996,023	38,036,353	343,032,400
116	TANAMBULAVA	LAMBARA	304,996,023	78,092,639	383,088,700
117	TANAMBULAVA	SIBALAYA SELATAN	304,996,023	43,838,861	348,834,900
118	TANAMBULAVA	SIBALAYA UTARA	304,996,023	90,236,288	395,232,300
119	TANAMBULAVA	SIBOWI	304,996,023	137,735,314	442,731,300
120	TANAMBULAVA	SIBALAYA BARAT	304,996,023	69,560,231	374,556,300
121	DOLO BARAT	SIBONU	304,996,023	30,570,026	335,566,000
122	DOLO BARAT	KALUKU TINGGU	304,996,023	47,260,904	352,256,900
123	DOLO BARAT	PEWUNU	304,996,023	69,695,205	374,691,200
124	DOLO BARAT	KALEKE	304,996,023	110,805,777	415,801,800
125	DOLO BARAT	RARAMPADENDE	304,996,023	98,171,298	403,167,300
126	DOLO BARAT	BALUMPEWA	304,996,023	62,553,061	367,549,100
127	DOLO BARAT	BALAMOA	304,996,023	62,023,346	367,019,400
128	DOLO BARAT	PESAKU	304,996,023	74,383,073	379,379,100
129	DOLO BARAT	MANTIKOLE	304,996,023	80,090,229	385,086,300
130	DOLO BARAT	BOBO	304,996,023	53,277,619	358,273,600
131	DOLO BARAT	BALAROA PEWENU	304,996,023	47,465,356	352,461,400
132	DOLO BARAT	LUKU	304,996,023	46,822,364	351,818,400
133	DOLO	TULO	304,996,023	152,419,435	457,415,500
134	DOLO	LANGALESO	304,996,023	117,838,010	422,834,000
135	DOLO	WATUBULA	304,996,023	65,195,707	370,191,700
136	DOLO	SOULOWE	304,996,023	77,246,228	382,242,300
137	DOLO	KARAWANA	304,996,023	67,631,220	372,627,200
138	DOLO	KOTAPULU	304,996,023	72,142,914	377,138,900
139	DOLO	KOTARINDAU	304,996,023	123,526,829	428,522,900
140	DOLO	WATURALELE	304,996,023	93,983,066	398,979,100
141	DOLO	MAKU	304,996,023	82,153,750	387,149,800
142	DOLO	POTOYA	304,996,023	86,926,200	391,922,200
143	DOLO	KABOBONA	304,996,023	103,899,638	408,895,700
144	KINOVARO	PORAME	304,996,023	82,478,277	387,474,300
145	KINOVARO	BALANE	304,996,023	78,919,443	383,915,500
146	KINOVARO	UWEMANJE	304,996,023	76,355,859	381,351,900
147	KINOVARO	RONDINGO	304,996,023	77,367,597	382,363,600
148	KINOVARO	BOLOBIA	304,996,023	50,517,937	355,514,000
149	KINOVARO	DODA	304,996,023	102,021,282	407,017,300
150	KINOVARO	KALORA	304,996,023	105,280,270	410,276,300
151	KINOVARO	KANUNA	304,996,023	74,177,101	379,173,100
152	KINOVARO	DAENGGUNE	304,996,023	59,136,298	364,132,300
153	KINOVARO	KAYUMPIA	304,996,023	50,166,277	355,162,300
154	MARAWOLA	LEBANU	304,996,023	28,415,358	333,411,400
155	MARAWOLA	BOMBA	304,996,023	49,053,605	354,049,600
156	MARAWOLA	BEKA	304,996,023	135,092,386	440,088,400
157	MARAWOLA	SIBEDI	304,996,023	71,242,327	376,238,300
158	MARAWOLA	PADENDE	304,996,023	63,315,279	368,311,300
159	MARAWOLA	SUNJU	304,996,023	63,535,967	368,532,000
160	MARAWOLA	TINGGEDE	304,996,023	193,266,146	498,262,200
161	MARAWOLA	BALIASE	304,996,023	121,168,442	426,164,500

1	2	3	4	5	6 (4+5)
162	MARAWOLA	BINANGGA	304,996,023	113,351,026	418,347,000
163	MARAWOLA	BOYABALIASE	304,996,023	45,857,766	350,853,800
164	MARAWOLA	TINGGEDE SELATAN	304,996,023	63,193,507	368,189,500
165	MARAWOLA BARAT	WAYU	304,996,023	39,212,108	344,208,100
166	MARAWOLA BARAT	TAIPANGGABE	304,996,023	35,663,320	340,659,300
167	MARAWOLA BARAT	MATANTIMALI	304,996,023	53,642,935	358,639,000
168	MARAWOLA BARAT	LEWARA	304,996,023	89,289,486	394,285,500
169	MARAWOLA BARAT	DOMBU	304,996,023	59,538,331	364,534,400
170	MARAWOLA BARAT	SOI	304,996,023	64,718,754	369,714,800
171	MARAWOLA BARAT	WUGAGA	304,996,023	89,665,530	394,661,600
172	MARAWOLA BARAT	PANASIBAJA	304,996,023	60,162,557	365,158,600
173	MARAWOLA BARAT	ONGULERO	304,996,023	55,622,586	360,618,600
174	MARAWOLA BARAT	WIAPORE	304,996,023	53,778,417	358,774,400
175	MARAWOLA BARAT	WAWUJAI	304,996,023	71,210,402	376,206,400
176	MARAWOLA BARAT	LEMOSIRANINDI	304,996,023	66,779,368	371,775,600
JUMLAH			53,679,300,080	13,419,825,020	67,099,125,100

BUPATI SIGI -

ttd

MUHAMAD IRWAN

